



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 27 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperlukan peta jabatan yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan aparatur sipil negara untuk setiap jenjang jabatan;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 228 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam penataan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 228 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

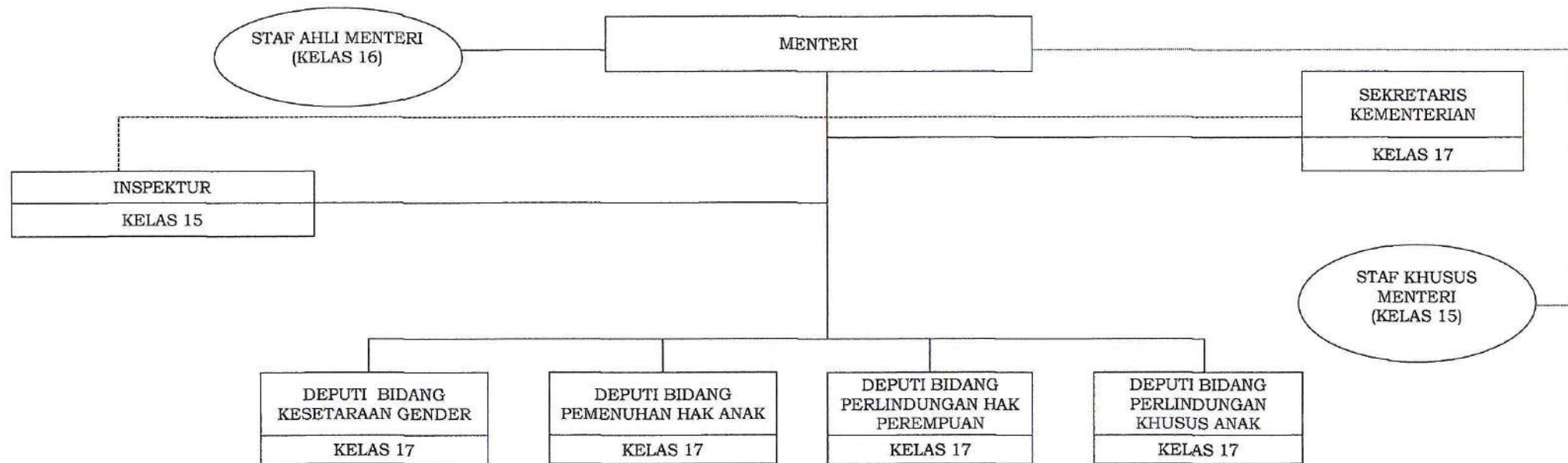


MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

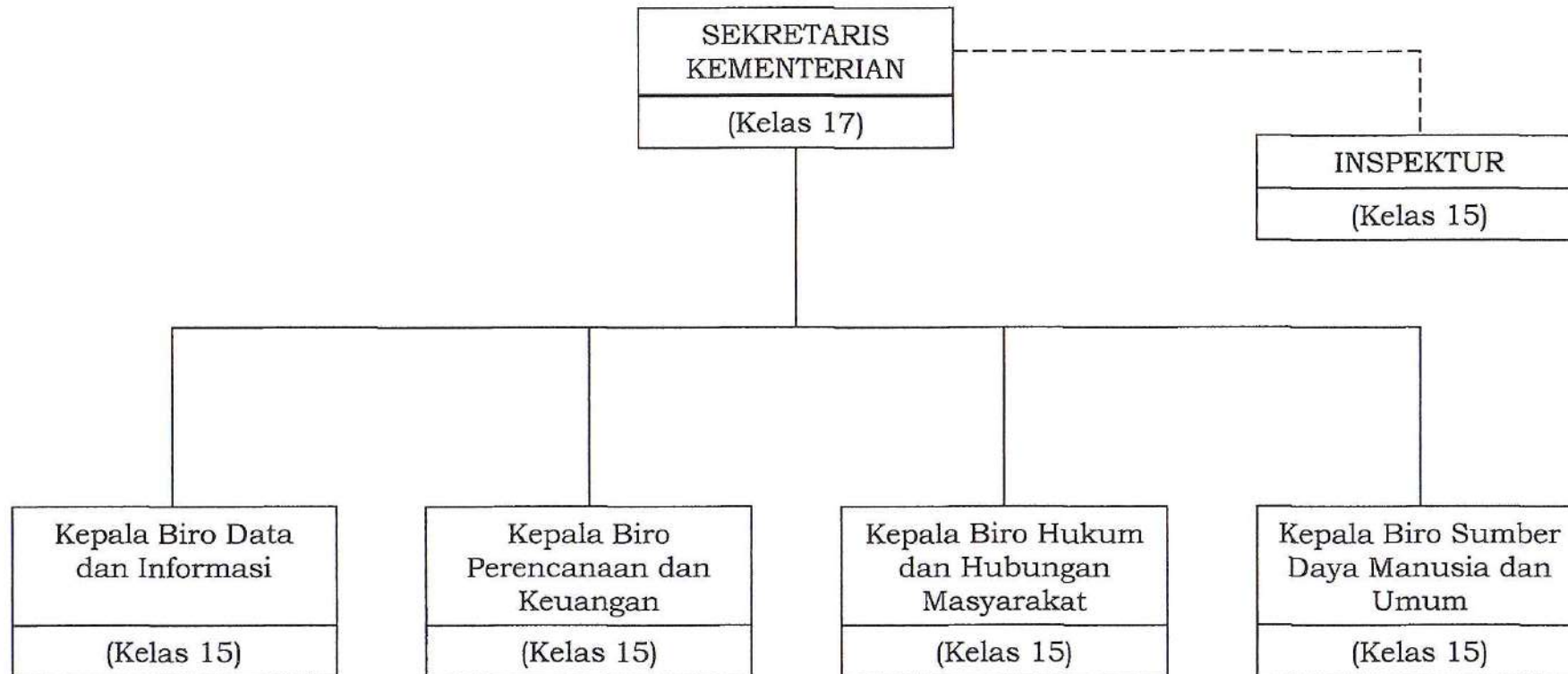




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

I. PETA JABATAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

A. PETA JABATAN BIRO DATA DAN INFORMASI

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Kepala Biro Data dan Informasi	15	1	0	1	0	0	0
2	Pranata Komputer Ahli Utama	13	0	0	0	0	0	0
3	Pranata Ahli Komputer Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
4	Pranata Komputer Ahli Madya	11	1	0	0	0	-1	0
5	Pranata Komputer Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0
6	Pranata Komputer Ahli Muda	9	2	0	0	0	-2	0
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	7	1	8	0	1
8	Pranata Komputer Penyelia	8	1	0	0	0	-1	0
9	Pranata Komputer Mahir	7	0	1	0	1	0	0
10	Pranata Komputer Terampil	6	2	0	0	0	-2	0
11	Manggala Informatika Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0
12	Statistisi Ahli Utama	13	0	0	0	0	0	0
13	Statistisi Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0
14	Statistisi Ahli Madya	11	2	0	0	0	-2	0
15	Statistisi Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0
16	Statistisi Ahli Muda	9	5	0	0	0	-5	0
17	Statistisi Ahli Pertama	8	5	10	1	10	-4	0
18	Statistisi Penyelia	8	1	0	0	0	-1	0
19	Statistisi Mahir	7	3	0	0	0	-3	0
20	Statistisi Terampil	6	5	0	0	0	-5	0
21	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	1	0	-1	0
22	Penata Layanan Operasional	7	10	2	0	0	-10	-2
23	Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	1	0	-1	0
24	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	0	0	0	-1
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>51</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>-39</b>	<b>-2</b>
			<b>72</b>		<b>31</b>		<b>-41</b>	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

B. PETA JABATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai (Bezetting)		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15	1	0	1	0	0	0
2	Analisis Anggaran Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
4	Analisis Anggaran Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	4	0	4	0	0	0
5	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
6	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	6	0	0	0	-6	0
7	Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
8	Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
9	Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
10	Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
11	Perencana Ahli Pertama	8	4	4	1	4	-3	0
12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
13	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	2	0	0	0	-2	0
14	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	3	0	2	0
15	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
16	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0
17	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	2	0	0	0	-2	0
18	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	9	0	0	0	-9	0
19	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	0	0	0	0	0	0
20	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	5	0	0	0
21	Penata Layanan Operasional	7	0	1	0	0	0	-1
22	Pengolah Data dan Informasi	6	7	0	7	0	0	0
23	Pengadministrasian Perkantoran	5	3	1	3	0	0	-1
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>50</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>-21</b>	<b>-2</b>
			<b>56</b>		<b>33</b>		<b>-23</b>	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

C. PETA JABATAN BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	15	1	0	1	0	0	0
2	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0
3	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0
4	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	5	0	0	0	-5	0
5	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	4	0	1	0	-3	0
6	Analisis Hukum Ahli Madya	11	4	0	0	0	-4	0
7	Analisis Hukum Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0
8	Analisis Hukum Ahli Muda	9	5	0	0	0	-5	0
9	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	0	0	0	0	0
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	5	0	0	0	-5	0
12	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0
13	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	6	2	0	2	-6	0
14	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	8	2	2	2	-6	0
15	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	0	0	0	0	0
16	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	0	0	0	0	0	0
17	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	4	0	4	0	0
18	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
19	Penerjemah Ahli Madya	11	0	0	0	0	0	0
20	Penerjemah Ahli Muda	9	0	0	0	0	0	0
21	Penerjemah Ahli Pertama	8	0	0	0	0	0	0
22	Penelaah Teknis Kebijakan	7	11	0	11	0	0	0
23	Penata Layanan Operasional	7	0	3	0	0	0	-3
24	Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	2	0	0	0
25	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	0	0	0	-1
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>60</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>-35</b>	<b>-4</b>
			<b>72</b>		<b>33</b>		<b>-39</b>	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

D. PETA JABATAN BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	15	1	0	1	0	0	0
2	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	13	1	0	1	0	0	0
3	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan	10	1	0	1	0	0	0
4	Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	13	1	0	1	0	0	0
5	Kepala Subbagian Protokol	10	1	0	1	0	0	0
6	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri	10	1	0	1	0	0	0
7	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian	10	1	0	1	0	0	0
8	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
9	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	5	0	0	0	-5	0
10	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	5	0	5	0	0	0
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0
12	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	4	4	0	4	-4	0
13	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	0	1	0	-1	0
14	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12	3	0	0	0	-3	0
15	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10	4	0	0	0	-4	0
16	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8	5	0	0	0	-5	0
17	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	1	0	1	0	0	0
18	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
19	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0
20	Pengelola Pengadaan	8	6	3	1	3	-5	0





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai (Bezetting)		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
	Barang/Jasa Ahli Pertama							
21	Penata Laksana Barang Penyelia	9	0	0	0	0	0	0
22	Penata Laksana Barang Mahir	8	2	0	0	0	-2	0
23	Penata Laksana Barang Terampil	6	4	0	4	0	0	0
24	Dokter Ahli Muda	10	1	0	1	0	0	0
25	Dokter Ahli Pertama	9	1	1	0	1	-1	0
26	Perawat Ahli Madya	11	1	0	0	0	-1	0
27	Perawat Ahli Muda	9	2	0	1	0	-1	0
28	Perawat Ahli Pertama	8	3	0	1	0	-2	0
29	Perawat Penyelia	8	2	0	0	0	-2	0
30	Perawat Mahir	7	1	0	0	0	-1	0
31	Perawat Terampil	6	2	0	0	0	-2	0
32	Apoteker Ahli Muda	9	1	0	0	0	-1	0
33	Apoteker Ahli Pertama	8	0	1	0	1	0	0
34	Dokter Gigi Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0
35	Dokter Gigi Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0
36	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	1	0	1	0	0	0
37	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1	0	0	0	-1	0
38	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	0	1	0	0
39	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	1	0	0	0	-1	0
40	Pustakawan Ahli Madya	11	1	0	1	0	0	0
41	Pustakawan Ahli Muda	9	0	0	0	0	0	0
42	Pustakawan Ahli Pertama	8	1	0	1	0	0	0
43	Arsiparis Ahli Utama	13	0	0	0	0	0	0
44	Arsiparis Ahli Madya	11	1	0	0	0	-1	0
45	Arsiparis Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
46	Arsiparis Ahli Muda	9	2	2	0	2	-2	0
47	Arsiparis Ahli Pertama	8	0	5	0	5	0	0
48	Arsiparis Penyelia	8	0	1	0	1	0	0
49	Arsiparis Mahir	7	2	3	0	3	-2	0
50	Arsiparis Terampil	6	1	0	1	0	0	0
51	Penata Keprotokolan	7	6	0	6	0	0	0
52	Pengelola Keprotokolan	6	3	0	2	0	-1	0
51	Penelaah Teknis Kebijakan	7	7	0	5	0	-2	0
52	Penata Layanan Operasional	7	1	3	1	0	0	-3
52	Pengolah Data dan Informasi	6	12	0	10	0	-2	0
53	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	7	0	0	0	-7
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>110</b>	<b>31</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>-57</b>	<b>-10</b>
			<b>141</b>		<b>74</b>		<b>-67</b>	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

E. PETA JABATAN INSPEKTORAT

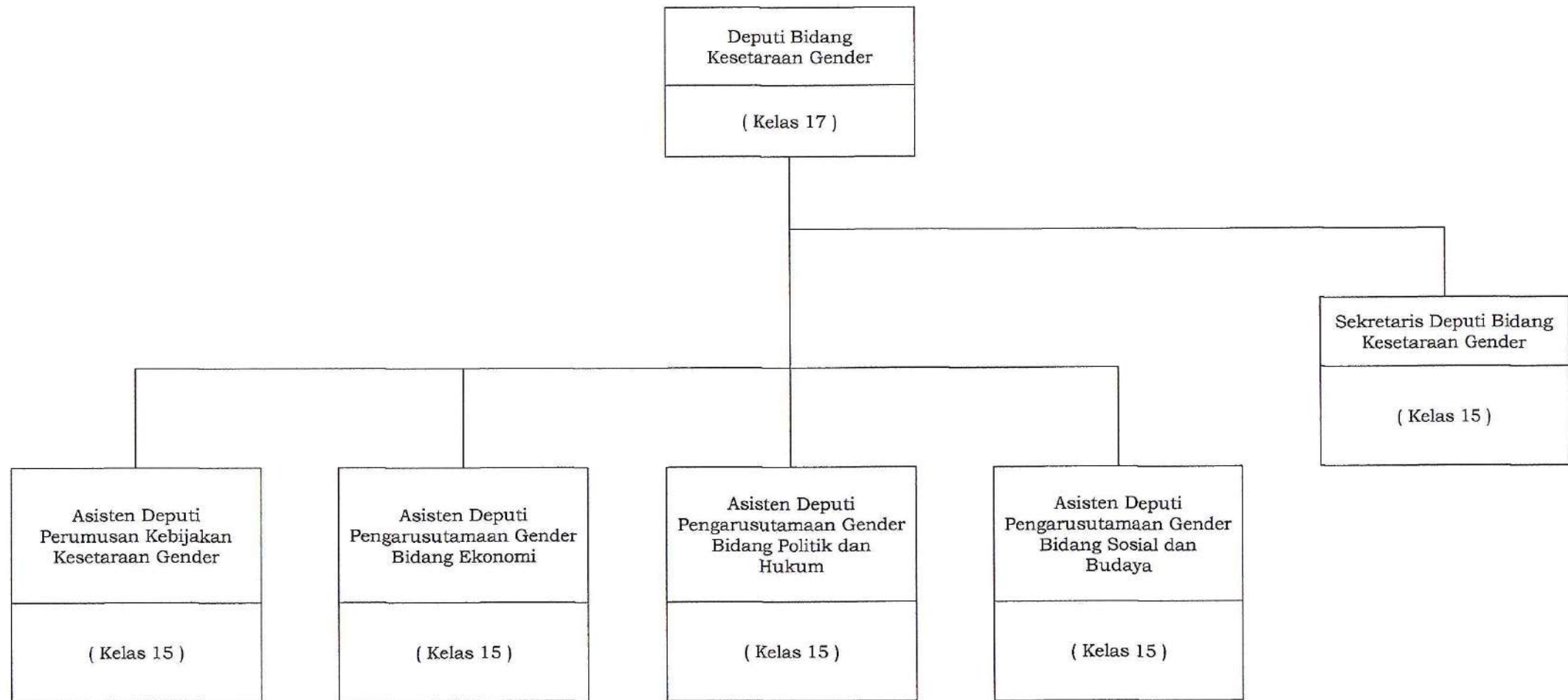
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Inspektur	15	1	0	1	0	0	0
2	Auditor Ahli Utama	14	1	0	0	0	-1	0
3	Auditor Ahli Madya	12	2	0	2	0	0	0
4	Auditor Ahli Muda	10	6	0	2	0	-4	0
5	Auditor Ahli Pertama	8	6	0	2	0	-4	0
6	Auditor Penyelia	9	0	0	0	0	0	0
7	Auditor Mahir	7	0	0	0	0	0	0
8	Auditor Terampil	6	6	0	3	0	-3	0
9	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	10	1	0	1	0	0	0
10	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Madya	12	0	0	0	0	0	0
11	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Muda	10	0	0	0	0	0	0
12	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	8	0	0	0	0	0	0
13	Pengolah Data dan Informasi	6	3	0	1	0	-2	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>26</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>
			<b>26</b>		<b>12</b>		<b>-14</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

II. PETA JABATAN DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

A. PETA JABATAN SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KESETARAAN  
GENDER

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai (Bezetting)		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	15	1	0	1	0	0	0
2	Analisis Anggaran Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
4	Analisis Anggaran Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0
5	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0
6	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	5	0	0	0	-5	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	2	0	0	0	-2	0
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0
13	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	2	0	0	0	-2	0
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	5	0	0	0	-5	0
15	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	3	0	3	0	0	0
16	Arsiparis Penyelia	8	0	1	0	0	0	-1
17	Arsiparis Terampil	6	0	1	0	1	0	
18	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	0	0	0	-1
19	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0
20	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7	1	0	0	0	-1	0
21	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	4	0	-1	0
22	Penata Layanan Operasional	7	0	2	0	0	0	-2
23	Pengolah Data dan Informasi	6	9	0	3	0	-6	0
24	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	0	0	0	-2
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>41</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>-25</b>	<b>-6</b>
			<b>48</b>		<b>17</b>		<b>-31</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

B. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN  
KESETARAAN GENDER

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	15	1	0	1	0	0	0
2	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	3	0	3	0	0	0
4	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	2	0	0	0	-2	0
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	3	0	3	0	0	0
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	5	0	0	0	-5	0
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	9	3	0	3	-9	0
8	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	5	0	0	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			28	3	12	3	-16	0
			31		15		-16	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENGARUSUTAMAAN GENDER  
BIDANG EKONOMI

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	15	1	0	1	0	0	0
2	Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0
4	Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
5	Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0
6	Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	3	3	0	0	-3	-3
8	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	0	5	0	0	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>13</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
			<b>16</b>		<b>10</b>		<b>-6</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENGARUSUTAMAAN GENDER  
BIDANG POLITIK DAN HUKUM

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	15	1	0	1	0	0	0
2	Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
4	Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
5	Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0
6	Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	4	2	0	2	-4	0
8	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	0	3	0	-2	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>13</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>
			<b>15</b>		<b>9</b>		<b>-6</b>	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

E. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENGARUSUTAMAAN GENDER  
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

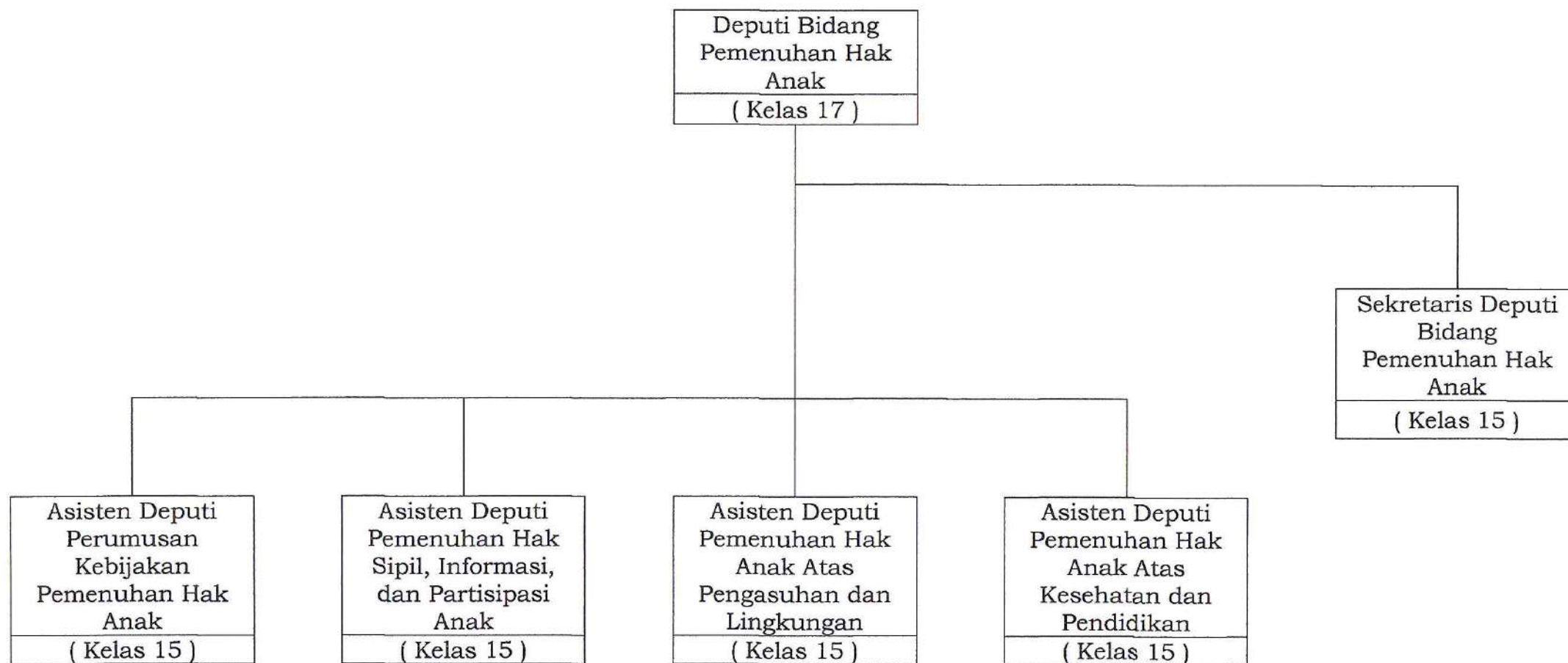
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya	15	1	0	1	0	0	0
2	Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
4	Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
5	Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	0	0	0	0	0	0
6	Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	5	1	0	1	-5	0
8	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	8	0	8	0	0	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>15</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
			<b>16</b>		<b>11</b>		<b>-5</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

III. PETA JABATAN DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

A. PETA JABATAN SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	15	1	0	1	0	0	0
2	Analisis Anggaran Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
4	Analisis Anggaran Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
5	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0
6	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	5	0	0	0	-5	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	2	0	0	0	-2	0
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0
13	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	2	0	0	0	-2	0
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	5	0	0	0	-5	0
15	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	3	0	3	0	0	0
16	Arsiparis Penyelia	8	0	1	0	0	0	-1
17	Arsiparis Terampil	6	0	1	0	1	0	0
18	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	0	0	0	-1
19	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0
20	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7	1	0	0	0	-1	0
21	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	2	0	-3	0
22	Penata Layanan Operasional	7	0	2	0	3	0	1
23	Pengolah Data dan Informasi	6	9	0	3	0	-6	
24	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	0	0	0	-2
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>40</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>-27</b>	<b>-3</b>
			<b>47</b>		<b>17</b>		<b>-30</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

B. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN  
PEMENUHAN HAK ANAK

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	15	1	0	1	0	0	0
2	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
4	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	4	0	0	0	-4	0
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	3	0	3	0	0	0
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	5	0	0	0	-5	0
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	9	3	0	3	-9	0
8	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	4	0	-1	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>28</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>
			<b>31</b>		<b>12</b>		<b>-19</b>	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK SIPIL,  
INFORMASI, DAN PARTISIPASI ANAK

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	15	1	0	1	0	0	0
2	Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	0	0	0	0	0	0
4	Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
5	Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0
6	Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	2	4	0	4	-2	0
8	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	0	3	0	-2	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
			<b>14</b>		<b>10</b>		<b>-4</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS  
PENGASUHAN DAN LINGKUNGAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan	15	1	0	1	0	0	0
2	Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0
4	Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
5	Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0
6	Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	2	4	0	4	-2	0
8	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	0	5	0	0	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>12</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
			<b>16</b>		<b>14</b>		<b>-2</b>	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

E. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

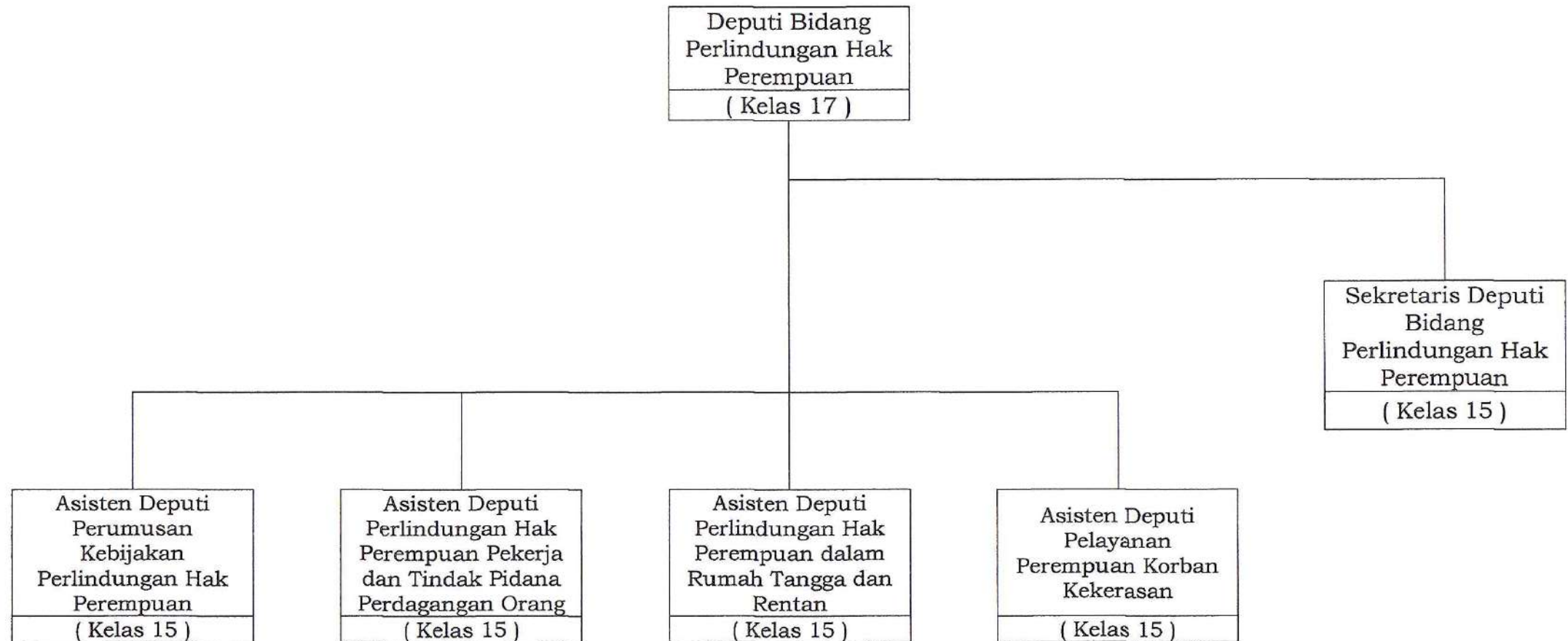
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	15	1	0	1	0	0	0
2	Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0
4	Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
5	Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
6	Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	3	3	0	3	-3	0
8	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	0	4	0	-1	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>12</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
			<b>15</b>		<b>11</b>		<b>-4</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

VI. PETA JABATAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

A. PETA JABATAN SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK  
PEREMPUAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	15	1	0	1	0	0	0
2	Analisis Anggaran Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
4	Analisis Anggaran Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
5	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0
6	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	5	0	0	0	-5	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	0	2	0	2	0	0
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0
13	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	2	0	0	0	-2	0
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	5	0	0	0	-5	0
15	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	1	0	1	0	0	0
16	Arsiparis Penyelia	8	0	1	0	1	0	0
17	Arsiparis Terampil	6	0	1	0	1	0	0
18	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	0	0	0	-1
19	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0
20	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7	1	0	1	0	0	0
21	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	4	0	-1	0
22	Penata Layanan Operasional	7	0	3	0	0	0	-3
23	Pengolah Data dan Informasi	6	9	0	2	0	-7	0
24	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	0	0	0	-2
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>37</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>-24</b>	<b>-6</b>
			<b>47</b>		<b>17</b>		<b>-30</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

B. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN  
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	15	1	0	1	0	0	0
2	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0
4	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	3	0	0	0	-3	0
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	4	0	4	0	0	0
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	4	0	0	0	-4	0
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	7	5	0	5	-7	0
8	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	3	0	-2	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>26</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>
			<b>31</b>		<b>15</b>		<b>-16</b>	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN  
PEKERJA DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	15	1	0	1	0	0	0
2	Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
4	Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
5	Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
6	Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	4	2	0	2	-4	0
8	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	0	4	0	-1	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>12</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
			<b>14</b>		<b>9</b>		<b>-5</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN  
DALAM RUMAH TANGGA DAN RENTAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	15	1	0	1	0	0	0
2	Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
4	Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
5	Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0
6	Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	6	0	0	0	-6	0
8	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	0	3	0	-2	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>15</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>
			<b>15</b>		<b>7</b>		<b>-8</b>	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

E. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PELAYANAN PEREMPUAN KORBAN  
KEKERASAN

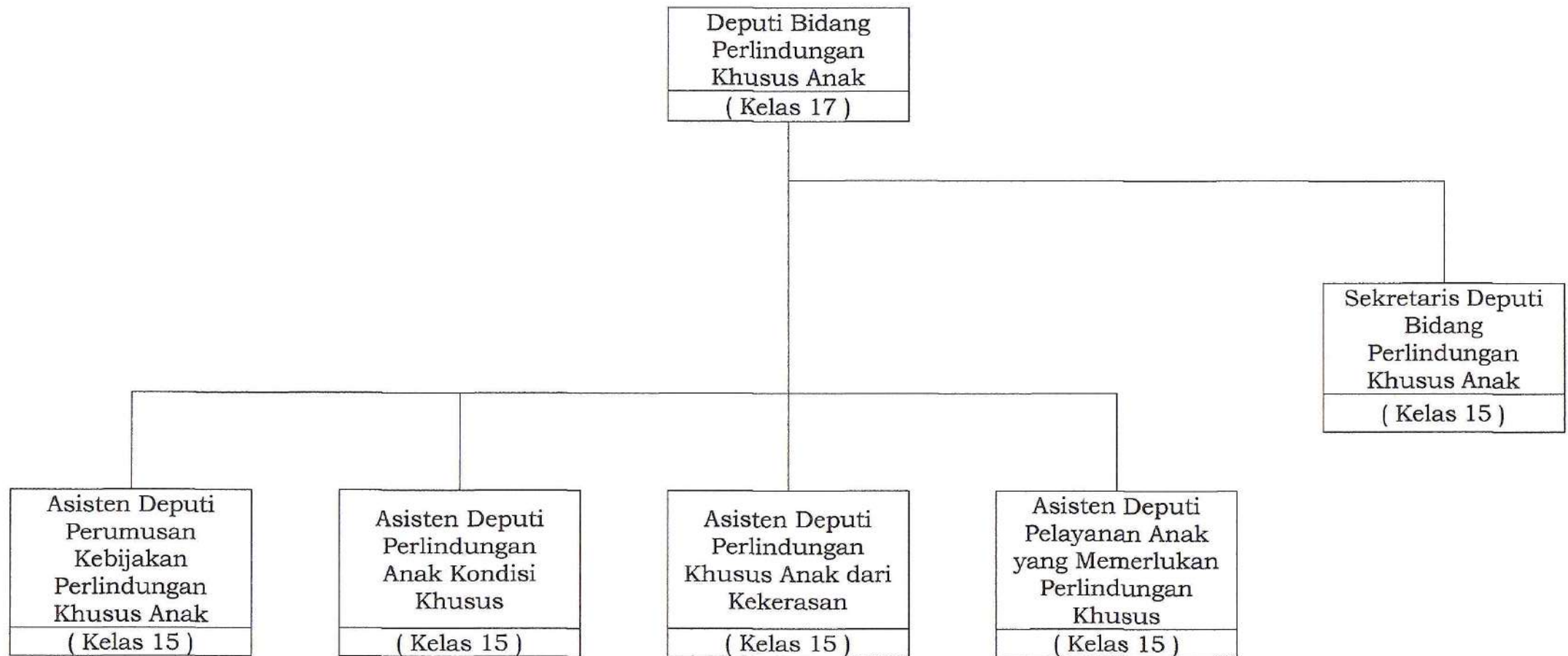
No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	15	1	0	0	0	-1	0
2	Penyuluh Sosial Ahli Madya	11	0	0	0	0	0	0
3	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	3	0	3	0	0	0
4	Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	0	0	0	0	0	0
5	Pekerja Sosial Ahli Madya	11	4	0	0	0	-4	0
6	Pekerja Sosial Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
7	Pekerja Sosial Ahli Muda	9	2	0	0	0	-2	0
8	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	0	5	0	6	0	1
9	Psikolog Klinis Ahli Muda	9	1	0	0	0	-1	0
10	Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	0	0	0	0	0	0
11	Analisis Hukum Ahli Muda	9	1	0	0	0	-1	0
12	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	2	2	0	2	-2	0
13	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	9	0	4	0	-5	0
14	Penata Layanan Operasional	7	10	0	0	0	-10	0
15	Pengolah Data dan Informasi	6	1	0	0	0	-1	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>35</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-27</b>	<b>1</b>
			<b>42</b>		<b>16</b>		<b>-26</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

VII. PETA JABATAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

A. PETA JABATAN SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN  
KHUSUS ANAK

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	15	1	0	1	0	0	0
2	Analisis Anggaran Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
4	Analisis Anggaran Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0
5	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0
6	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	5	0	0	0	-5	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	0	2	0	2	0	0
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	1	0	-1	0
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0
13	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	2	0	0	0	-2	0
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	5	0	0	0	-5	0
15	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	2	0	2	0	0	0
16	Arsiparis Penyelia	8	0	1	0	0	0	-1
17	Arsiparis Terampil	6	0	1	0	0	0	-1
18	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
19	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	0	1	0	0
20	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0
21	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7	1	0	1	0	0	0
22	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	4	0	-1	0
23	Penata Layanan Operasional	7	0	2	0	0	0	-2



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
24	Pengolah Data dan Informasi	6	9	0	3	0	-6	0
25	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	0	0	0	-2
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>40</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>-23</b>	<b>-6</b>
			<b>49</b>		<b>20</b>		<b>-29</b>	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

B. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN  
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	15	1	0	1	0	0	0
2	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0
4	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	3	0	0	0	-3	0
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	3	0	3	0	0	0
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	5	0	0	0	-5	0
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	11	1	0	1	-11	0
8	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	4	0	-1	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>30</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
			<b>31</b>		<b>11</b>		<b>-20</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK KONDISI KHUSUS

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	15	1	0	1	0	0	0
2	Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0
4	Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
5	Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
6	Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	6	0	0	0	-6	0
8	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	0	5	0	0	0
9	Pengolah Data dan Informasi	6	1	0	1	0	0	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>15</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>
			<b>15</b>		<b>9</b>		<b>-6</b>	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  
DARI KEKERASAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	15	1	0	1	0	0	0
2	Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0
3	Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0
4	Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0
5	Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
6	Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0
7	Perencana Ahli Pertama	8	5	1	0	1	-5	0
8	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	0	3	0	-2	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>14</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>
			<b>15</b>		<b>8</b>		<b>-7</b>	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

E. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PELAYANAN ANAK YANG  
MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Analisis Beban Kerja		Ketersediaan Pegawai ( <i>Bezetting</i> )		Kebutuhan	
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	15	1	0	0	0	-1	0
2	Penyuluh Sosial Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0
3	Penyuluh Sosial Ahli Madya	11	0	0	0	0	0	0
4	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
5	Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	0	0	0	0	0	0
6	Pekerja Sosial Ahli Madya	11	3	0	0	0	-3	0
7	Pekerja Sosial Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0
8	Pekerja Sosial Ahli Muda	9	2	0	0	0	-2	0
9	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	0	3	0	3	0	0
10	Psikolog Klinis Ahli Muda	9	2	0	0	0	-2	0
11	Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	4	0	1	0	-3	0
12	Analisis Hukum Ahli Muda	9	1	0	0	0	-1	0
13	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	1	3	0	0	-1	-3
14	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	9	0	6	0	-3	0
15	Penata Layanan Operasional	7	10	0	0	0	-10	0
16	Pengolah Data dan Informasi	6	1	0	0	0	-1	0
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			<b>38</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>-27</b>	<b>-3</b>
			<b>44</b>		<b>14</b>		<b>-30</b>	

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI